



TANTANGAN PENGEMBANGAN WISATA BERDASARKAN DINAMIKA PARTISIPASI MASYARAKAT DESA MONTONGSARI, KABUPATEN KENDAL

TOURISM DEVELOPMENT CHALLENGES BASED ON THE DYNAMICS OF COMMUNITY PARTICIPATION MONTONGSARI VILLAGE, KENDAL REGENCY

S Sunarti^{a*}, Maya Damayanti^a, Landung Esariti^a, Mardwi Rahdriawan^a, Novia Cecilia Medina^a

^aDepartemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro; Semarang

*Korespondensi: sunarti@pwk.undip.ac.id

Info Artikel:

- Artikel Masuk: 21 Oktober 2022
- Artikel diterima: 28 Desember 2022
- Tersedia Online: 31 Desember 2022

ABSTRAK

Sektor pariwisata dapat menunjang pemberdayaan dan perekonomian masyarakat dikarenakan melibatkan dan berdampak langsung bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting sekaligus pemicu tantangan pengembangan wisata khususnya wisata baru di daerah tertinggal. Desa Montongsari, Kabupaten Kendal merupakan desa yang diinisiasi menjadi wisata namun memiliki tantangan dalam pengembangannya berupa lahan kering serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Partisipasi seharusnya menjadi pertimbangan penting untuk pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pengembangan wisata berdasarkan dinamika partisipasi masyarakat di Desa Montongsari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan informasi melalui wawancara kepada fasilitator pada Focus Group Discussion (FGD) pengembangan wisata serta teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan pengembangan wisata berdasarkan partisipasi masyarakat berkaitan dengan kurangnya kesadaran masyarakat tentang potensi dan manfaat kegiatan wisata, kesibukan aktivitas masyarakat, hingga kurangnya perhatian pemerintahan setempat. Sosialisasi dan pemberian motivasi dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat namun juga menghasilkan tantangan berupa perbedaan pendapat masyarakat. Dengan demikian, diperlukan pertimbangan prioritas pendapat masyarakat serta akses partisipasi dan pembagian peran masyarakat dalam mengelola, memelihara dan menerima manfaat wisata.

Kata Kunci : Tantangan Pengembangan Wisata, Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat, Dinamika Partisipasi

ABSTRACT

Tourism sector can support the empowerment and economy of the community because it involves and has a direct impact on the community. Community participation is an important element also a trigger for tourism development challenges, especially new tourism in underdeveloped areas. Montongsari Village, Kendal Regency was initiated into tourism but has development challenges because of dry land and a lack of community awareness and participation. Participation necessarily important for community empowerment in tourism. This study aims to analyze the challenges of tourism development based on the dynamics of community participation in Montongsari Village. The research used a qualitative approach by interviews with facilitators during Focus Group Discussions on tourism development as well as qualitative descriptive analysis techniques. The results show that the challenges of developing tourism based on community participation such as lack of public awareness about the potential and benefits of tourism, busyness of community activities, and lack of attention from local government. Socialization and motivation can increase participation but also generate challenges in differences of community opinion. Thus, it is necessary to consider the priority of public opinion as well as access to participation and distribution of community roles in managing, maintaining, and receiving tourism benefits.

Keyword: Tourism Development Challenges, Community-Based Tourism Development, Participation Dynamics

1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor yang dinilai efektif dalam menunjang peningkatan perekonomian, pemberdayaan masyarakat, hingga pengentasan kemiskinan (Cholik, 2017; Martini, 2020; Peiris, Sandaruwani, Aslam, & Wijekoon, 2021; Zhao & Xia, 2020). Hal tersebut dikarenakan pariwisata dapat melibatkan dan berdampak langsung bagi masyarakat lokal (Kala & Bagri, 2018; Karim, 2020; Yanes, Zielinski, Cano, & Kim, 2019), sehingga memicu metamorfosis masyarakat dalam berbagai aspek (Karim, 2020). Pengembangan wisata juga dapat menunjang masyarakat untuk memanfaatkan potensi dan menghasilkan manfaat ekonomi (Putra & Indriyani, 2021). Namun, bagaimana masyarakat lokal berpartisipasi dan mengambil manfaat dari wisata masih menjadi perdebatan (Magigi & Ramadhani, 2013).

Partisipasi masyarakat menjadi model sukses di negara maju namun memiliki hambatan di negara berkembang (Chili & Ngxongo, 2017). Indonesia sebagai negara berkembang menempatkan masyarakat sebagai aktor pengembangan wisata (Setiyorini, Andari, & Masunah, 2019), namun tidak menutup kemungkinan partisipasi masyarakat masih menjadi permasalahan pengembangan wisata. Permasalahan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata diakibatkan karena tidak adanya informasi yang baik (Chili & Ngxongo, 2017; Sood, Lynch, & Anastasiadou, 2017), kurangnya kapasitas masyarakat (Chili & Ngxongo, 2017; Leno, 2015; Sood et al., 2017), serta ketidaksesuaian partisipasi dengan manfaat yang diharapkan (Mubita, Libati, & Mulonda, 2017). Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga dapat mengakibatkan masyarakat kehilangan manfaat wisata (Kala & Bagri, 2018). Padahal, partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama merupakan elemen penting pengembangan wisata (Chan, Marzuki, & Mohtar, 2021; Chili & Ngxongo, 2017; Rahman, Asbi, & Putri, 2020; Setiyorini et al., 2019).

Penelitian terdahulu banyak membahas tentang faktor pemengaruh, bentuk, dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata yang telah berkembang (Chan et al., 2021; Martini, 2020; Setiyorini et al., 2019; Singgalen, Sasongko, & Wiloso, 2019). Namun, belum terdapat penelitian yang menimbang dinamika partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi tantangan pengembangan wisata. Penelitian tentang tantangan pengembangan wisata juga cenderung fokus pada lokasi wisata yang telah berkembang (Andrades & Dimanche, 2017; Chili & Ngxongo, 2017; Leno, 2015; Postelnicu & Dabija, 2016), dengan skala penelitian pada lingkup nasional (Andrades & Dimanche, 2017; Khodadadi, 2016; Postelnicu & Dabija, 2016). Padahal, tantangan pengembangan wisata berdasarkan partisipasi masyarakat penting dan dapat semakin kompleks pada daerah tujuan wisata baru di daerah tertinggal (Kala & Bagri, 2018).

Berdasarkan literatur, daerah pedesaan yang tertinggal memiliki karakteristik kualitas lahan yang rendah namun sebagian besar memiliki potensi alam (Jamal & Robinso, 2009) serta kegiatan ekonomi hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup saja (Sood et al., 2017). Masyarakat pada daerah tertinggal juga seringkali tidak menyadari potensi dan manfaat wisata yang mengakibatkan hambatan efektivitas partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam memenuhi harapan pengunjung wisata (Kala & Bagri, 2018). Dengan demikian, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses rintisan wisata pada daerah tertinggal dapat mengakibatkan tantangan dalam keberlangsungan pengembangan wisata. Fenomena tersebut terjadi pada salah satu daerah tertinggal di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah yaitu Desa Montongsari yang didukung pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian melalui desa wisata.

Desa Montongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal merupakan desa yang diinisiasi menjadi wisata baru dikarenakan potensi sumber daya alam khususnya pertanian. Bupati Kendal mendukung pengembangan wisata ditandai dengan Peraturan Bupati Kendal nomor 27 tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata. Namun, Desa Montongsari masih tertinggal karena permasalahan lahan kering yang mengakibatkan produktivitas pertanian rendah serta belum adanya eksplorasi potensi sumber daya untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan pengembangan wisata di Desa Montongsari. Padahal, partisipasi masyarakat mempengaruhi manfaat yang akan diperoleh masyarakat serta tanggung jawab pemeliharaan sumber daya wisata

(Martini, 2020). Dengan demikian, dinamika partisipasi masyarakat menjadi poin penting yang harus dipertimbangkan sebagai antisipasi tantangan pengembangan wisata khususnya yang baru dirintis.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis tantangan pengembangan wisata berdasarkan dinamika partisipasi masyarakat di Desa Montongsari, Kabupaten Kendal. Penelitian dapat menjadi pembaharuan dikarenakan lebih menekankan pada tantangan pengembangan wisata yang baru dirintis pada tingkat lokal dengan pertimbangan dinamika partisipasi masyarakat yang menjadi elemen terpenting dalam pengembangan wisata. Menurut Arrahmah & Wicaksono (2022), dinamika partisipasi berfokus pada realisasi aktivitas dan inisiatif partisipasi masyarakat. Pemahaman dinamika partisipasi dapat mengeksplorasi kontribusi, karakteristik, serta perubahan partisipasi sehingga dapat menunjukkan keadaan yang mungkin terjadi akibat kelemahan dan kekuatan dalam suatu kelompok (Mortensen & Haas, 2018). Dinamika partisipasi menjadi dasar analisis kekuatan dan kondisi partisipasi masyarakat yang dapat mempengaruhi tantangan yang telah dan mungkin terjadi dalam inisiasi pengembangan wisata. Dalam penelitian, dinamika tersebut berdasarkan pada partisipasi masyarakat saat *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai metode untuk memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmiah berupa pemahaman tantangan pengembangan wisata baru yang dapat terjadi berdasarkan dinamika partisipasi masyarakat.

2. DATA DAN METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menafsirkan fenomena yang menekankan pada makna daripada generalisasi (Anggito & Setiawan, 2018). Penelitian tersebut dapat untuk meneliti tingkah laku dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat (Jaya, 2020). Penerapan penelitian kualitatif difokuskan untuk memahami dinamika partisipasi masyarakat yang menjadi tantangan pengembangan wisata. Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara kepada fasilitator tentang dinamika partisipasi masyarakat (kekuatan dan perubahan partisipasi) saat *Focus Group Discussion* (FGD). Fasilitator merupakan individu yang memberikan arahan diskusi kelompok sehingga memahami proses dan karakteristik partisipasi masyarakat saat FGD. FGD merupakan proses pengumpulan data dan informasi melalui diskusi kelompok tentang isu atau topik spesifik untuk memecahkan masalah atau mencapai kesepakatan tertentu (Sugarda, 2020). FGD tersebut dipilih karena dapat untuk mengetahui kerjasama dan komunikasi *stakeholder* dalam menemukan solusi pengembangan wisata (Kagungan & Yulianti, 2019).

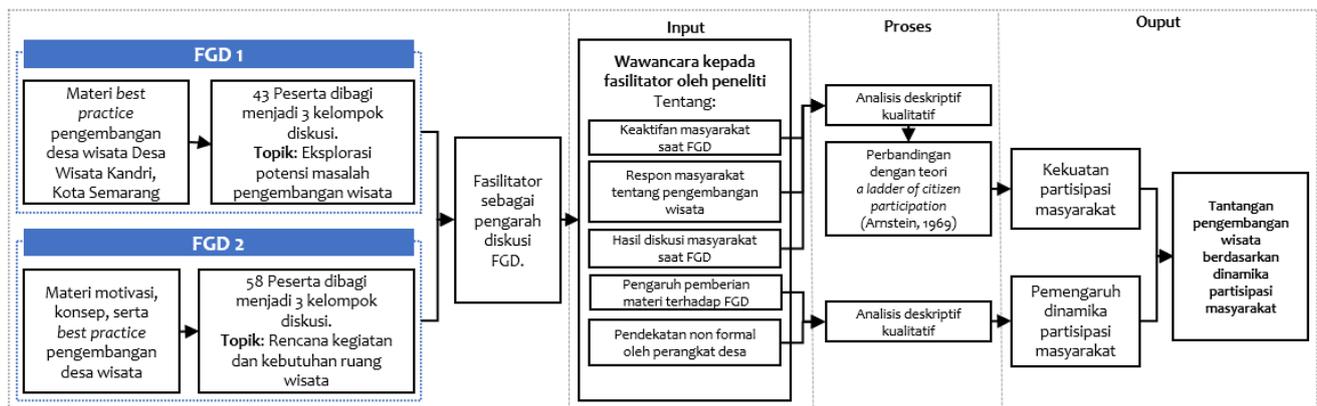
Pelaksanaan FGD dilakukan sebanyak 2 kali dengan melibatkan berbagai *stakeholder*. FGD 1 dilaksanakan pada September 2021 yang dihadiri 43 peserta, sedangkan FGD 2 dilaksanakan pada Agustus 2022 yang dihadiri oleh 58 peserta. Menurut Sugarda (2020), secara teknis, diskusi kelompok pada FGD dilaksanakan dengan peserta 7-10 orang/kelompok yang homogen agar setiap individu memiliki peluang berpendapat. FGD dilakukan secara bebas dan spontan dengan didampingi fasilitator yang mengacu pada panduan diskusi. Dengan demikian, pelaksanaan diskusi saat FGD dibagi menjadi 3 kelompok diskusi yaitu kelompok masyarakat, perangkat setempat, serta tim ahli (Tabel 1). Dalam hal ini, fasilitator berperan penting untuk memberikan informasi tentang dinamika partisipasi masyarakat pada setiap kelompok diskusi saat FGD. Kutipan pernyataan dari fasilitator ditunjukkan dengan pemberian kode yaitu pengumpulan informasi/kode informan kunci (Contoh: W/F1 = Wawancara/Fasilitator 1) (Tabel 1).

Tabel 1. Kelompok Focus Group Discussion (FGD)

No.	Kelompok Diskusi saat FGD	Informan Kunci	Kode	Pengumpulan Informasi
1.	1-Kelompok Masyarakat: Kelompok Tani, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Usaha, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kader pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD).	Fasilitator 1	F1	Wawancara (W)
2.	2-Perangkat Setempat: Ketua RT dan RW serta Perangkat Desa	Fasilitator 2	F2	
3.	3- Tim Ahli: Dinas Pariwisata, Tokoh Masyarakat yang berpengaruh	Fasilitator 3	F3	

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Sebelum FGD, terdapat pula sesi materi untuk memberikan pemahaman awal dan memantik keaktifan masyarakat saat FGD. Materi saat FGD 1 yaitu *best practice* pengembangan desa wisata Desa Wisata Kandri, Kota Semarang, serta materi saat FGD 2 yaitu motivasi, konsep, serta *best practice* pengembangan desa wisata. Adapun fokus diskusi pada FGD 1 berkaitan dengan eksplorasi potensi dan masalah pengembangan wisata, sedangkan FGD 2 berkaitan dengan eksplorasi rencana kegiatan dan kebutuhan ruang dalam pengembangan wisata. Selanjutnya, hasil dan partisipasi masyarakat saat FGD dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menghasilkan dinamika partisipasi masyarakat dan tantangan pengembangan wisata. Alur penelitian hingga menghasilkan analisis tantangan pengembangan wisata berdasarkan dinamika partisipasi masyarakat ditunjukkan Gambar 1.

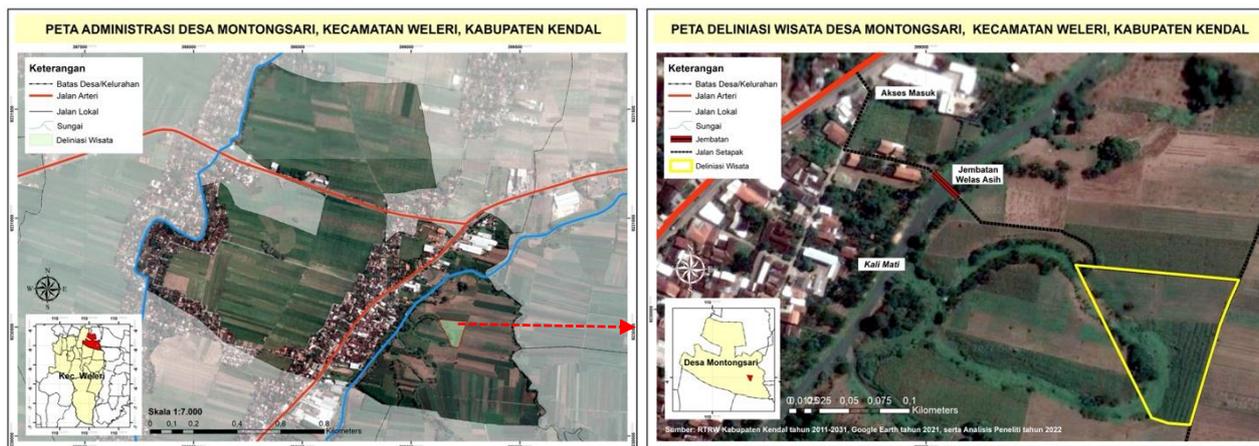


Sumber: Hasil Analisis, 2022
Gambar 1. Metode Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum

Desa Montongsari terletak di bagian utara Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal dengan luas 1,37 Km² yang terbagi menjadi 3 dukuh yaitu Montongkrajan, Montongtambak, dan Montongkulon (lihat Gambar 1). Seluas 78% lahan di Desa Montongsari merupakan lahan pertanian hingga menduduki peringkat 5 lahan pertanian terluas di Kecamatan Weleri. Menurut Profil Desa Montongsari (2020) dan Badan Pusat Statistik (BPS) (2021), Desa Montongsari memiliki penduduk 2.976 jiwa dengan terdapat 267 rumah tangga usaha pertanian. Meskipun demikian, belum optimalnya jangkauan irigasi pertanian khususnya di bagian timur desa mengakibatkan rendahnya produksi pertanian yang hanya mencapai 97 ton/tahun untuk produksi jagung dan 955 ton/tahun untuk produksi padi (Profil Desa Montongsari, 2020).



Sumber: Hasil Analisis, 2022

Gambar 2. Peta Administrasi dan Deliniasi Wisata Desa Montongsari, Kabupaten Kendal

Keberadaan pertanian seharusnya menjadi potensi desa wisata agar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan (Drajad et al., 2022). Inisiasi pengembangan wisata baru di Desa Montongsari dapat menjadi solusi untuk memanfaatkan peluang pertanian serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu hasil kontribusi pemerintah Desa Montongsari dalam pengembangan wisata berupa sumbangsih lahan bengkok desa letter C seluas 1,1 Ha yang dapat dimanfaatkan sebagai etalase desa wisata (Gambar 1.). Etalase tersebut dapat menampilkan produk dan kegiatan yang menjadi daya tarik wisata dari sektor pertanian maupun potensi pendukung lain, seperti kesenian, peternakan, UMKM, dan lainnya yang belum dieksplorasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Namun, kondisi partisipasi dan kapasitas masyarakat Desa Montongsari yang belum optimal dalam mengembangkan wisata menjadikan desa ini sesuai untuk fokus penelitian yaitu tentang tantangan pengembangan wisata berdasarkan dinamika partisipasi masyarakat.

3.2. Dinamika Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Desa Montongsari

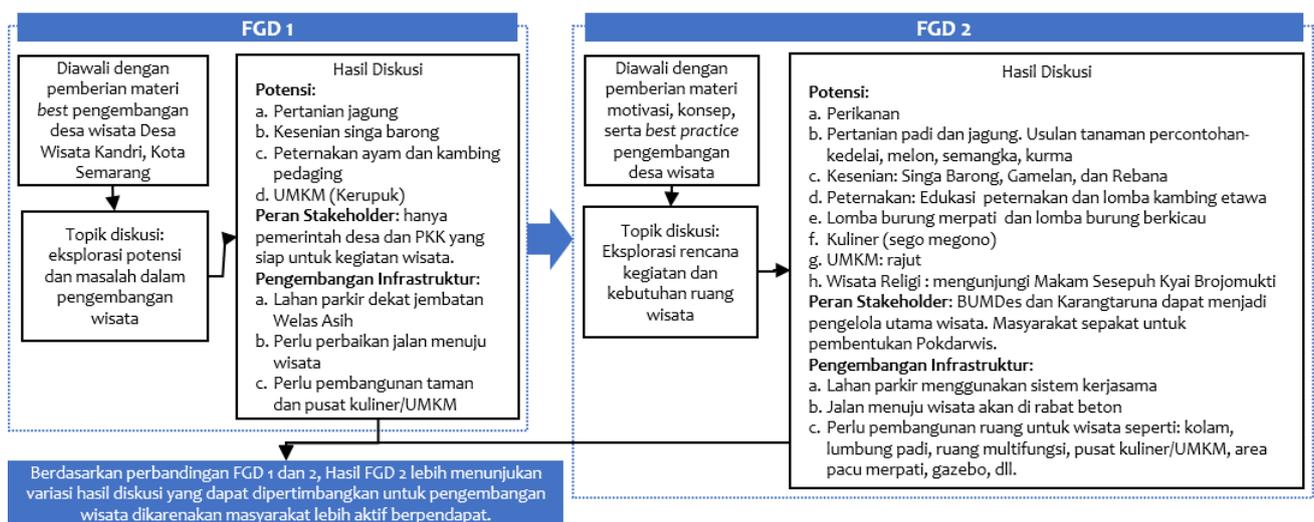
Dinamika partisipasi merupakan realisasi partisipasi meliputi kekuatan, karakteristik, serta perubahan partisipasi dalam kelompok (Arrahmah & Wicaksono, 2022; Mortensen & Haas, 2018). Pada penelitian, dinamika partisipasi fokus pada kekuatan dan perubahan partisipasi masyarakat saat FGD 1 dan 2 tentang pengembangan wisata di Desa Montongsari.

3.2.1 Kekuatan Partisipasi Masyarakat Desa Montongsari

Menurut Wondirad & Ewnetu (2019), analisis partisipasi tidak memadai jika belum mengaitkan dengan teori *A Ladder of Citizen Participation* atau tangga partisipasi publik oleh Arnstein (1969). Setiap tangga partisipasi menunjukkan kekuatan masyarakat dalam mempengaruhi hasil melalui intervensi yang responsif dari partisipasi masyarakat (Mubita et al., 2017). Tangga partisipasi dapat untuk mengetahui apakah masyarakat telah memiliki kontrol/kekuasaan mutlak atau masih dalam taraf non-partisipasi. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa tangga partisipasi dapat untuk memahami sejauh mana partisipasi masyarakat mempengaruhi proses pengembangan wisata (Mak, Cheung, & Hui, 2017; Singgalen et al., 2019; Wondirad & Ewnetu, 2019). Namun, penelitian terdahulu belum menimbang tantangan pengembangan wisata yang telah dan dapat terjadi berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat. Pada penelitian, keaktifan, hasil diskusi, dan respon pengembangan wisata saat FGD 1 dan 2 akan dikaitkan dengan tangga partisipasi sebagai model dasar untuk mengetahui kekuatan dan tantangan partisipasi masyarakat yang mempengaruhi pengembangan wisata di Desa Montongsari.

Pada penelitian, FGD 1 dan 2 menjadi proses yang saling berkaitan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan wisata. Secara garis besar, seluruh fasilitator sepakat bahwa masyarakat lebih aktif memberikan aspirasi saat FGD 2 dibandingkan FGD 1. Saat FGD 1, sebagian masyarakat belum memberikan masukan atau informasi khususnya pada kelompok 1 dan 2. Pada kelompok 2 perangkat setempat, banyak masyarakat yang tidak bersedia mengatakan atau menuliskan aspirasinya karena adanya perasaan telah diwakili oleh perangkat dengan jabatan lebih tinggi (W/F2). Pada penelitian serupa, disparitas kekuasaan memang menjadi hambatan karena masyarakat percaya bahwa perencana wisata dan otoritas lebih tinggi memiliki kapasitas mengembangkan wisata tanpa dukungan mereka (Kala & Bagri, 2018). Pada kelompok 1 juga hanya sedikit masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi padahal perwakilan kelompok masyarakat tersebut sudah diambil dari berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, UMKM, kesenian, hingga lembaga masyarakat lainnya yang diharapkan bisa banyak memberi masukan potensi untuk pengembangan wisata (W/F1).

Selanjutnya saat FGD 2, hampir seluruh masyarakat telah bersedia memberikan masukan dan informasi terkait potensi Desa Montongsari yang dapat menjadi daya tarik wisata. Keberagaman kelompok masyarakat di Desa Montongsari seperti kelompok tani, kesenian, peternak, PKK, dan sebagainya juga menghasilkan berbagai masukan dari berbagai aspek dan sudut pandang. Namun, Diskusi kelompok 1 masyarakat dan 2 perangkat setempat telah menunjukkan kecenderungan bahwa masyarakat menginginkan kepentingan kelompok mereka dapat diwadahi dan dijadikan atraksi wisata (W/F1&2). Akibatnya, FGD 2 menghasilkan banyaknya variasi keinginan kegiatan wisata bahkan dalam ruang yang sama pada etalase kegiatan wisata di Desa Montongsari. Bertentangan dengan hal tersebut, diskusi kelompok 3 tim ahli berpendapat bahwa pengembangan wisata di Desa Montongsari sebaiknya dapat fokus pada satu atau dua kegiatan yang menarik dan berpotensi untuk berkelanjutan serta tetap ramah lingkungan (W/F3). Kondisi tersebut menunjukkan perbedaan karakteristik stakeholder memberikan pandangan dan pola pikir yang berbeda. Perbedaan keaktifan masyarakat saat FGD 1 dan 2 berimplikasi terhadap hasil diskusi saat FGD. FGD 2 lebih menghasilkan variasi potensi kegiatan yang dapat mendukung wisata. Meskipun kelompok yang dilibatkan sama seperti saat FGD 1, namun banyak potensi yang justru baru didapatkan saat FGD 2 karena masyarakat lebih terbuka untuk menyampaikan aspirasinya baik secara langsung maupun melalui tulisan. Gambaran pelaksanaan dan hasil FGD ditunjukkan pada Gambar 3.



Sumber: Hasil Analisis, 2022

Gambar 3. Gambaran Pelaksanaan dan Hasil Diskusi FGD 1 dan FGD 2 Desa Montongsari

Selain keaktifan masyarakat, respon masyarakat saat FGD 1 dan 2 terhadap pengembangan wisata di Desa Montongsari juga menunjukkan perbedaan. Pada FGD 1, terdapat pula masyarakat yang mengatakan seperti Desa Montongsari punya potensi apa untuk wisata, saya juga tidak tahu kalau akan ada desa wisata, hingga wisata tidak memberikan dampak bagi mereka yang mayoritas petani (W/F1). Masyarakat beranggapan bahwa pengembangan wisata tidak akan berdampak bagi perekonomian dan kehidupan masyarakat sehingga tidak ingin berpartisipasi. Selaras dengan penelitian terdahulu, masyarakat dengan pendapatan utama dari pertanian cenderung merasakan bahwa pariwisata tidak cocok diterapkan karena biaya peluang lebih tinggi serta rutinitas masyarakat yang sibuk untuk mengelola pertanian (Kala & Bagri, 2018). Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh masyarakat yang tidak memiliki gambaran manfaat yang dapat diambil dari kegiatan wisata. Padahal, lingkup pengembangan wisata berbasis masyarakat tidak hanya menekankan pada kesempatan partisipasi masyarakat melainkan juga distribusi keuntungan pada masyarakat yang tidak terlibat langsung hingga kurang beruntung (Rahman et al., 2020). Dengan demikian, FGD 1 belum dapat memberikan pemahaman awal sejauh mana masyarakat dapat terlibat dan mengambil manfaat dari pengembangan wisata.

Disisi lain, pada FGD 2 setiap perwakilan kelompok masyarakat dari berbagai sektor mau memberikan usulan dengan harapan bidang keahlian mereka juga dapat diwadahi dalam etalase kegiatan wisata Desa Montongsari (W/F1&F2). Namun, perdebatan antar kelompok masyarakat yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan FGD juga terjadi pada FGD 2 khususnya pada kelompok 2 perangkat setempat. Selain itu, perubahan perilaku masyarakat juga ditunjukkan saat FGD 2 ditandai dengan Perangkat Desa Montongsari menyampaikan bahwa masyarakat telah sepakat untuk pemberdayaan Karang Taruna, PKK, BUMDes, dan lembaga desa lainnya serta pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam rangka mendukung pengembangan wisata di Desa Montongsari (W/F2). Respon dan partisipasi masyarakat yang lebih positif pada FGD 2 dapat menjadi pendukung utama untuk meningkatkan pengembangan wisata.

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan teori *A Ladder of Citizen Participation* oleh Arnstein (2019), kekuatan partisipasi masyarakat terbagi menjadi 3 tahapan, meliputi non-partisipasi yaitu masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pembangunan, tokenisme yaitu masyarakat dapat mengekspresikan aspirasi namun belum sepenuhnya mempengaruhi keputusan, serta kekuasaan masyarakat yaitu masyarakat berhak membuat keputusan dan terlibat secara maksimal (Wondirad & Ewnetu, 2019). Pelaksanaan FGD 1 dan 2 pada dasarnya berada pada tahapan tokenisme khususnya tangga penentruman (*placation*) dikarenakan masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya untuk pengembangan wisata yang dapat dipertimbangkan oleh fasilitator, perangkat desa, dan tim ahli. Namun pada implementasinya, saat FGD 1, sebagian masyarakat hanya hadir untuk berpartisipasi namun belum memberikan masukan atau informasi dikarenakan masyarakat merasa tidak ada kesempatan yang sama serta keberadaan wisata tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kondisi kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat khususnya terkait manfaat kegiatan dan maksud pemerintah setempat dalam menampung aspirasi merupakan ciri manipulasi dalam partisipasi masyarakat (Junus, Syafriny, & Egam, 2021; Rahina & Wahyuhana, 2022). Dengan demikian, partisipasi masyarakat saat FGD 1 masih menunjukkan ciri manipulasi meskipun pendapat masyarakat masih dapat dipertimbangkan dalam pengembangan wisata di Desa Montongsari.

3.2.2 Pemengaruh Dinamika Partisipasi Masyarakat Desa Montongsari

Dinamika partisipasi masyarakat Desa Montongsari saat FGD 1 dan 2 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Sunarti, Helmi, Widjajanti, & Purwanto (2021), perubahan perilaku masyarakat dapat dilakukan dengan teknik pemberian informasi, motivasi positif, serta paksaan. Motivasi menjadi faktor utama yang mempengaruhi partisipasi karena berpengaruh terhadap kesadaran manfaat pariwisata serta kebutuhan sosial/afiliasi (Sood et al., 2017). Selaras dengan penelitian tersebut, FGD 2 dapat memantik masyarakat untuk lebih aktif dikarenakan adanya pemberian materi berupa motivasi positif serta informasi yang lebih sederhana tentang pengembangan wisata berbasis masyarakat. Apabila dibandingkan dengan

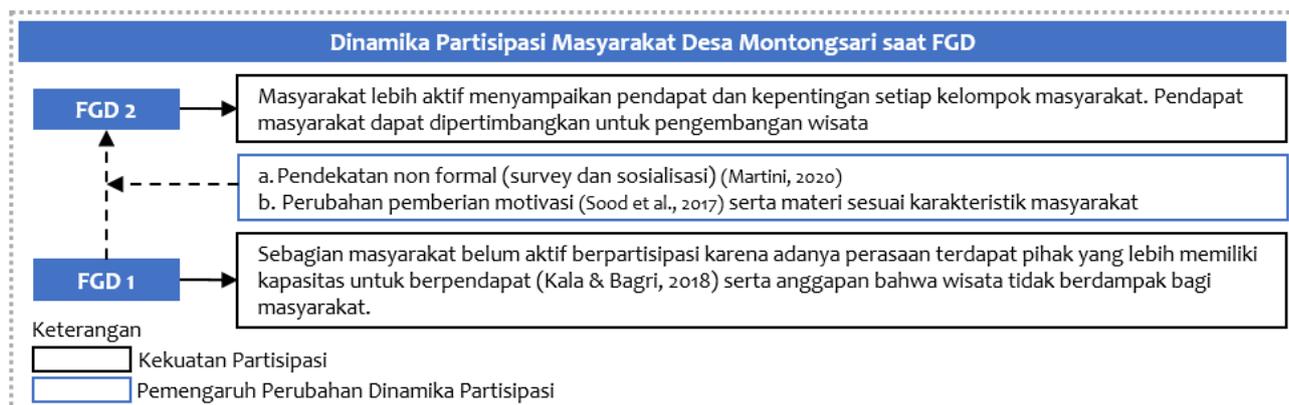
FGD 1, cara penyampaian informasi dan motivasi kepada masyarakat menjadi tantangan yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat.

“Materi pada FGD 2 lebih dapat diterima masyarakat karena dengan penyampaian dan contoh sederhana sesuai dengan karakteristik di Desa Montongsari. Masyarakat juga diberikan motivasi bahwa Desa Montongsari memiliki potensi yang dapat dieksplorasi untuk wisata. Komunikasi 2 arah juga terjadi saat sesi materi sehingga meningkatkan antusiasme masyarakat” (W/F2)

Menurut Lenao (2015), perasaan tidak adanya perhatian dan kepentingan untuk berpartisipasi dapat berasal dari kurangnya inspirasi. Pada pelaksanaan FGD 1, masyarakat telah diberikan informasi tentang *best practice* pengembangan wisata namun pada kasus yang telah berhasil serta dengan potensi yang jelas telah dieksplorasi, sedangkan saat itu masyarakat bahkan masih belum menyadari apabila desa mereka dijadikan lokasi wisata (W/F1). Keterbatasan pemikiran masyarakat menjadi salah satu penyebab kurangnya partisipasi (Rahman et al., 2020). Pemberian materi sebelum diskusi kelompok menjadi poin penting dikarenakan dapat mengarahkan pola pikir dan aspirasi masyarakat saat diskusi. Penelitian menunjukkan bahwa dengan pemberian materi *best practice* dengan karakteristik potensi yang berbeda justru mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa untuk wisata hanya dapat berhasil apabila telah ada potensi yang berkembang dan unggul. Pernyataan tersebut berdasarkan wawancara yaitu kelompok 3 kelompok masyarakat sudah aktif berpendapat tetapi justru menceritakan potensi di desa lain yang sudah berkembang (W/F1). Artinya, masyarakat masih belum menyadari bahwa Desa Montongsari juga memiliki potensi yang sebenarnya dapat pula dieksplorasi dan dikembangkan oleh masyarakat.

Pendekatan non formal juga menjadi cara untuk memberikan pemahaman awal kepada masyarakat tentang rencana pengembangan wisata di Desa Montongsari. Sebelum FGD 2, sudah ada kegiatan survei dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengembangan wisata pada lahan bengkok desa sehingga masyarakat sudah lebih memahami bahwa Desa Montongsari akan menjadi lokasi wisata (W/F3). Pendekatan survei pada lokasi kegiatan wisata dan potensi yang dimiliki masyarakat dilakukan oleh perangkat Desa Montongsari dan akademisi yaitu perwakilan tim Pengabdian Masyarakat dari Universitas Diponegoro. Sosialisasi melalui pemberian informasi secara lisan oleh perangkat desa kepada masyarakat bahwa Desa Montongsari akan menjadi desa wisata dengan fokus kegiatan wisata pada lahan bengkok desa. Menurut Martini (2020), sosialisasi kepada masyarakat dapat menjadi upaya untuk meningkatkan partisipasi dan kerjasama masyarakat dalam mendukung gagasan pengembangan wisata.

Menurut wawancara, FGD 1 seharusnya berada pada tahap *informing* sehingga masyarakat belum diminta untuk banyak berpendapat tetapi lebih banyak mendengarkan informasi tentang pengembangan wisata di Desa Montongsari (W/F2). Namun, pelaksanaan FGD lebih diperuntukkan untuk memberikan kesempatan berpendapat yang sama bagi masyarakat dalam pengembangan wisata. Meskipun berbeda, pelaksanaan FGD 1 dan 2 memiliki tujuan yang sama untuk menggali informasi dari masyarakat tentang potensi dan permasalahan desa saat FGD 1 serta rencana kegiatan dan kebutuhan ruang wisata saat FGD 2. Artinya, tahapan *informing* seharusnya dilakukan sebelum FGD 1 diiringi dengan pendekatan non formal sebelum pelaksanaan FGD yang penting untuk mempengaruhi keaktifan partisipasi masyarakat saat FGD. Secara rinci, keterkaitan kekuatan dan perubahan dinamika partisipasi masyarakat saat FGD 1 dan 2 Desa Montongsari ditunjukkan pada Gambar 5.



Sumber: Hasil Analisis, 2022

Gambar 4. Keterkaitan Kekuatan dan Perubahan Dinamika Partisipasi Masyarakat Desa Montongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal

3.3. Tantangan Pengembangan Wisata Berdasarkan Dinamika Partisipasi Masyarakat

3.3.1 Tantangan Pengembangan Wisata yang Telah Terjadi Berdasarkan Dinamika Partisipasi Masyarakat Desa Montongsari

Secara garis besar, dinamika partisipasi masyarakat di Desa Montongsari cukup bergantung pada pemberian informasi, motivasi, serta pendekatan non formal. Dalam rintisan pengembangan wisata di Desa Montongsari, bagaimana masyarakat memiliki pemahaman awal yang baik tentang potensi dan manfaat wisata menjadi kunci untuk memantik partisipasi masyarakat. Tantangan yang ditemui saat FGD 1 adalah belum adanya pendekatan awal kepada masyarakat tentang rencana pengembangan wisata mengakibatkan masih adanya masyarakat yang tidak menyadari potensi dan kepentingan pengembangan wisata di Desa Montongsari. Kurangnya informasi tersebut merupakan salah satu hambatan utama yang mencegah masyarakat untuk berpartisipasi dalam inisiatif pengembangan wisata (Chili & Ngxongo, 2017; Sood et al., 2017). Perasaan tidak mengetahui bagaimana seharusnya mereka terlibat untuk bekerja sama juga berpengaruh terhadap partisipasi dan kapasitas masyarakat (Lenao, 2015). Selain itu, saat FGD 1, sebagian masyarakat tidak berpartisipasi aktif dikarenakan adanya pemikiran bahwa pengembangan wisata tidak berdampak bagi masyarakat yang memiliki usaha pertanian. Menurut penelitian terdahulu, masyarakat kurang aktif dikarenakan kurangnya kesadaran, kecenderungan masyarakat yang lebih fokus pada aktivitas sehari-hari (bertani), serta adanya persepsi masyarakat bahwa sektor pertanian lebih menghasilkan dibandingkan wisata (Kagungan & Yulianti, 2019; Kala & Bagri, 2018). Artinya, aktivitas dan kebiasaan masyarakat juga menjadi tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, pemberian pemahaman awal untuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang potensi wisata, kepentingan pengembangan wisata, hingga manfaat yang dapat diterima masyarakat menjadi poin penting yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengembangan wisata menjadi hambatan sosial yang membutuhkan proses yang panjang dan fleksibel (Kala & Bagri, 2018). Tantangan dalam pendekatan non formal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga dipengaruhi peran aktif perangkat pemerintahan setempat. Menurut Rahman et al., (2020), kurangnya perhatian pemerintah dalam melihat dan mengembangkan wisata mempengaruhi pemahaman potensi wisata yang rendah sehingga menjadi kendala awal pengembangan desa wisata. Sebelum FGD 1, pemberian informasi oleh perangkat desa masih terbatas pada akan diadakannya FGD untuk membahas pengembangan wisata di Desa Montongsari, namun sosialisasi tentang potensi wisata yang dapat dikembangkan bersama dengan masyarakat belum pernah dilakukan sebelum FGD 1. Menurut Arnstein (2019), pada tahap manipulasi sekalipun perangkat atau pemerintahan setempat tetap harus memberikan penjelasan, membujuk, dan menasehati masyarakat

untuk pengumpulan informasi dan mendapatkan dukungan masyarakat. Artinya, sosialisasi dan ajakan pengembangan wisata seharusnya dapat dilakukan oleh perangkat pemerintahan setempat sejak sebelum pelaksanaan FGD 1. Selanjutnya, pendekatan non formal berupa survei dan sosialisasi oleh perangkat Desa Montongsari dan akademisi dari Universitas Diponegoro setelah FGD 1 telah menunjukkan pengaruh positif pada kekuatan partisipasi masyarakat saat FGD 2. Tantangan yang harus diantisipasi pada tahapan ini adalah peran perangkat pemerintahan setempat tersebut juga perlu untuk dibatasi. Hal tersebut dikarenakan disparitas kekuasaan juga dapat mempengaruhi masyarakat merasa tidak memiliki kesempatan yang sama dalam pengembangan wisata (Kala & Bagri, 2018).

Peningkatan kekuatan partisipasi masyarakat saat FGD 2 menjadi tujuan utama pelaksanaan FGD, namun juga menghasilkan tantangan berupa perbedaan pendapat dan kepentingan masyarakat. Menurut Adianti (2021), secara teknis FGD dilakukan untuk menggali potensi, masalah, serta mengembangkan branding kawasan sesuai aspirasi masyarakat, namun keputusan branding yang dipilih tetap berdasarkan tim ahli. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa variasi kegiatan wisata hasil FGD 2 merupakan masukan yang dapat dipilah dengan bantuan tim ahli dan fasilitator untuk menghasilkan konsep utama pengembangan wisata. Selaras dengan pernyataan, *diskusi kelompok 3 tim ahli juga berpendapat bahwa pengembangan wisata di Desa Montongsari sebaiknya dapat fokus pada satu atau dua kegiatan yang menarik dan berpotensi untuk berkelanjutan serta tetap ramah lingkungan (W/F3)*. Namun, penetapan kegiatan utama wisata dari berbagai kegiatan yang telah diusulkan masyarakat bukanlah perkara yang mudah. Tantangan yang dapat muncul adalah fokus kegiatan wisata pada prioritas tertentu dapat mengakibatkan masyarakat merasa pendapatnya tidak dipertimbangkan sehingga tidak ingin berpartisipasi lebih lanjut. Dengan demikian, perbedaan pendapat dan kepentingan masyarakat tersebut dapat menjadi tantangan pengembangan wisata disamping tingkat partisipasi masyarakat.

3.3.2 Tantangan Pengembangan Wisata yang Dapat Terjadi Berdasarkan Dinamika Partisipasi Masyarakat Desa Montongsari

Pelaksanaan FGD 1 dan 2 pada dasarnya merupakan tahapan yang saling berkaitan dalam rintisan pengembangan wisata baru di Desa Montongsari. Berdasarkan analisis, penyesuaian perbedaan pendapat dan kepentingan masyarakat saat FGD 2 menjadi menjadi titik kritis yang dapat mempengaruhi tantangan pengembangan wisata lebih lanjut, seperti partisipasi masyarakat dalam mengelola, memelihara, dan menerima manfaat dari wisata. Sesuai dengan hasil analisis kekuatan partisipasi masyarakat, perbedaan pendapat dan kepentingan masyarakat saat FGD 2 dapat diatasi sesuai tingkat partisipasi yaitu penentraman (*placation*) dimana pendapat masyarakat akan dipertimbangkan bersama. Menurut Arnstein (2019), penentraman permasalahan partisipasi dapat bergantung pada kualitas bantuan teknis dalam mengartikulasikan prioritas usulan masyarakat. Dalam konteks pengembangan wisata di Desa Montongsari, bantuan teknis dapat berasal dari tim ahli dan fasilitator dalam menetapkan prioritas kegiatan wisata sesuai hasil FGD serta pertimbangan teoritis maupun praktis. Pertimbangan pengembangan desa wisata juga dapat berdasarkan indikator prioritas seperti potensi daya tarik wisata, kearifan lokal, sarana prasarana penunjang wisata, serta promosi wisata (Widyastuty & Dwiarta, 2021). Pada kasus Desa Montongsari, pertanian dapat menjadi konsep daya tarik wisata yang utama dikarenakan termasuk dalam karakteristik lokal serta sesuai dengan kebijakan dari pemerintah kabupaten setempat. Potensi lain seperti kesenian (singa barong dan gamelan), peternakan (kambing etawa), hingga kebiasaan masyarakat (lomba burung) dan sebagainya juga dapat menjadi daya tarik pendukung untuk menghidupkan etalase wisata. Etalase wisata tersebut dapat menjadi representasi desa yang dapat mengarahkan wisatawan untuk berkunjung pada berbagai lokasi potensi di Desa Montongsari sebagai upaya pemerataan manfaat ekonomi.

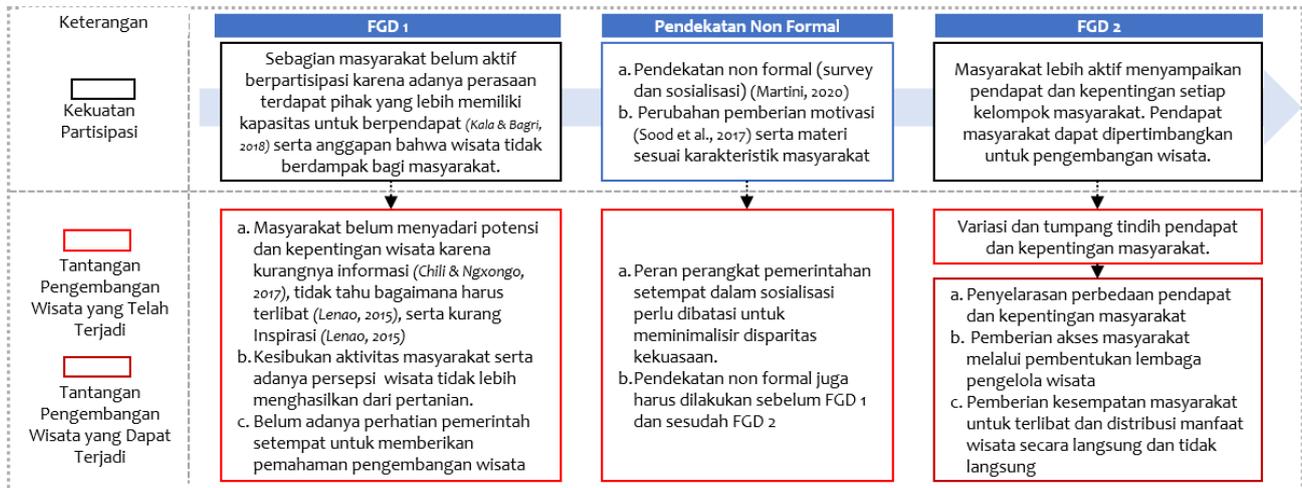
Penentraman permasalahan partisipasi juga dapat melalui sejauh mana masyarakat telah diorganisir untuk merumuskan prioritas tersebut (Arnstein, 2019). Pemberian akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat melalui pembentukan lembaga pembuat kebijakan yang mencakup beberapa perwakilan masyarakat yang terpilih (Arnstein, 2019). Seluruh kelompok FGD pada dasarnya

telah menyinggung bahwa Karang Taruna serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang dapat mewakili masyarakat dalam perumusan pengembangan wisata. Bahkan, masyarakat menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi pengelola utama wisata untuk mengkoordinir kegiatan dan pembagian keuntungan dari wisata (W/F2). Namun, Masih minimnya peran pemuda Karang Taruna serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum dilegalisasi menjadi masalah di Desa Montongsari. Apabila diterapkan dalam pengembangan wisata, pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis) sebagai pengelola utama yang menaungi kelompok masyarakat lainnya dapat menjadi solusi untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat. Pokdarwis merupakan lembaga masyarakat yang dinilai dapat meningkatkan pemahaman, kepedulian, serta nilai wisata bagi masyarakat sekaligus berperan dalam penggerak pengembangan wisata (Yatmaja, 2019). Setelah FGD 2, perangkat dan masyarakat Desa Montongsari sepakat untuk pembentukan pokdarwis yang menandakan bahwa FGD 2 juga berdampak pada perubahan perilaku masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan wisata di Desa Montongsari.

Selanjutnya, dukungan perangkat desa diperlukan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung gagasan pengembangan desa wisata (Martini, 2020). Poin penting yang menjadi tantangan selanjutnya adalah perlunya pemberian informasi kepada masyarakat bahwa prioritas kegiatan wisata yang terpilih telah mempertimbangkan karakteristik masyarakat, indikator wisata, serta prospek pengembangan wisata di masa mendatang. Pemberian informasi kepada masyarakat tentang ajakan partisipasi dan kerjasama masyarakat dalam mewujudkan desa wisata juga penting untuk dilakukan (Martini, 2020). Terbukanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan wisata dapat mempengaruhi manfaat dan keuntungan ekonomi yang diperoleh masyarakat (Martini, 2020). Pengembangan wisata pun tidak dapat sepenuhnya berhasil apabila manfaat wisata hanya didapatkan sebagian pihak secara langsung. Hal tersebut dapat terjadi apabila keterlibatan masyarakat hanya difokuskan pada masyarakat dengan bidang keahlian sesuai konsep pengembangan wisata.

Menurut penelitian Chan et al., (2021), manfaat wisata bagi masyarakat dapat dimaksimalkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat sebagai pemilik, pengelola, pelatih, hingga pengembang kapasitas. Rahman et al., (2020) juga menambahkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi secara tidak langsung melalui berbagai peran seperti pengurus wisata, pemandu wisata, penyaji kesenian, penyedia makanan dan lain sebagainya. Dengan demikian, koordinasi pembagian peran dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara wisata menjadi tantangan selanjutnya yang penting untuk dipertimbangkan untuk optimalisasi manfaat wisata yang akan diperoleh masyarakat. Hal tersebut sekaligus menjadi upaya untuk menghilangkan persepsi masyarakat Desa Montongsari seperti saat FGD 1 yaitu wisata tidak akan berdampak pada masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani.

Secara ringkas, keterkaitan dinamika partisipasi dan tantangan yang telah dan dapat terjadi dalam pengembangan wisata di Desa Montongsari ditunjukkan pada Gambar 6 Sebagai berikut:



Sumber: Hasil Analisis, 2022

Gambar 5. Tantangan Pengembangan Wisata berdasarkan Dinamika Partisipasi Masyarakat Desa Montongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal

4. KESIMPULAN

Tantangan pengembangan wisata yang baru dirintis pada dasarnya dipengaruhi oleh kekuatan dan perubahan partisipasi masyarakat. Pada penelitian, tantangan pengembangan wisata dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang potensi dan manfaat wisata serta kurangnya perhatian pemerintah setempat dalam memberikan informasi pengembangan wisata. Selain itu, kesibukan aktivitas masyarakat khususnya berbasis pertanian juga memunculkan pandangan bahwa mata pencaharian masyarakat saat ini lebih menghasilkan dibandingkan manfaat wisata yang belum pasti. Kondisi tersebut berimplikasi pada tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah. Upaya pendekatan non formal melalui survei dan sosialisasi secara lisan serta perubahan perilaku melalui motivasi dan ajakan aksi nyata oleh perangkat desa setempat dan akademisi berperan penting dalam mempengaruhi kekuatan partisipasi masyarakat. Namun, peningkatan partisipasi masyarakat tersebut juga menghasilkan tantangan baru berupa perbedaan pendapat dan kepentingan masyarakat dalam pengembangan wisata. Penentraman perbedaan pendapat tersebut menjadi titik kritis yang dapat mempengaruhi tantangan pengembangan wisata lebih lanjut. Oleh karena itu, dalam mengatasi tantangan pengembangan wisata diperlukan adanya artikulasi prioritas usulan masyarakat untuk konsep pengembangan wisata, pemberian akses partisipasi melalui lembaga masyarakat, hingga koordinasi pembagian peran dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara wisata untuk memastikan keberlanjutan pengembangan wisata. Hasil penelitian tersebut penting untuk dipertimbangkan dalam pengembangan wisata dikarenakan dapat berimplikasi pada peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengelola, memelihara, dan menerima manfaat wisata agar dapat berkelanjutan. Dengan kata lain, penelitian memberikan manfaat ilmiah berupa pemahaman tentang tantangan pengembangan wisata berdasarkan dinamika partisipasi masyarakat serta upaya untuk mengatasi tantangan tersebut.

5. PERNYATAAN RESMI

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penelitian khususnya untuk sumber dana selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Universitas Diponegoro tahun anggaran 2022 nomor: 186-20/UN 7.6.1/PM/2022.

6. REFERENSI

- Adianti, I. (2021). Proses Penyusunan Masterplan Kampung melalui Focus Group Discussion (FGD). *Jurnal Abmas Negeri*, 2(1), 17–24. <https://doi.org/10.36590/jagri.v2i1.121>
- Andrades, L., & Dimanche, F. (2017). Destination Competitiveness and Tourism Development in Russia: Issues and Challenges. *Tourism Management*, 62, 360–376. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.05.008>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari, Ed.). Sukabumi: CV Jejak.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal Of The American Institute Of Planners*, 35(4), 216–224. Retrieved from <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944366908977225>
- Arnstein, S. R. (2019). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 85(1), 24–34. <https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1559388>
- Arrahmah, N., & Wicaksono, F. (2022). Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Ekowisata Hutan Mangrove Wana Tirta di Kabupaten Kulon Progo. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 5(1), 13–24. <https://doi.org/10.17509/jithor.v5i1.36974>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Kecamatan Weleri Dalam Angka 2021. Kabupaten Kendal.
- Chan, J. K. L., Marzuki, K. M., & Mohtar, T. M. (2021). Local Community Participation and Responsible Tourism Practices in Ecotourism Destination: A Case of Lower Kinabatangan, Sabah. *Sustainability*, 13(13302), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su132313302>
- Chili, N. S., & Ngxongo, N. A. (2017). Challenges to Active Community Involvement in Tourism Development at Didima Resort - a Case Study of Umhlwazini Community in Bergville. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 6(2), 1–15. Retrieved from <http://www.ajhtl.com>
- Cholik, M. A. (2017). The Development of Tourism Industry in Indonesia: Current Problems and Challenges. *European Journal of Research and Reflection in Management Sciences*, 5(1), 49–59. Retrieved from www.idpublications.org
- Drajad, H., Sianipar, R. S., Tio, A., Yonna, T., Santoso, E., Fathoni, I., ... Kastowo, C. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Berbasis Pertanian. *Jurnal Atma Inovasia (JAI)*, 2(3), 244–250. <https://doi.org/https://doi.org/10.24002/jai.v2i3.3968>
- Jamal, T., & Robinso, M. (Eds.). (2009). *The SAGE Handbook of Tourism Studies*. Britania Raya: SAGE Publications. Retrieved from https://www.google.co.id/books/edition/_ZefUfF_ZIsYC?hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjy-uLa18X6AhXiELcAHQ97AbMQ8fIDegQlExAK
- Jaya, I. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Junus, A. Y. ., Syafriny, R., & Egam, P. P. (2021). Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Objek Wisata di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Spasial*, 8(3), 533–543.
- Kagungan, D., & Yulianti, D. (2019). The Synergy Among Stakeholders to Develop Pisang Island as Marine Tourism : The Case of Underdeveloped Area. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 32(1), 16–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mkp.V32i12019.16-23>
- Kala, D., & Bagri, S. C. (2018). Barriers to Local Community Participation in Tourism Development: Evidence from Mountainous State Uttarakhand, India. *Tourism: An International Interdisciplinary Journal*, 66(3), 318–333. Retrieved from <https://hrcak.srce.hr/206164>
- Karim, A. (2020). The Role of Village Tourism in Improving the Community's Economy During the Covid-19 Period in Enrekang District. *Academia*, (July). Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/343236134>
- Khodadadi, M. (2016). Challenges and opportunities for tourism development in Iran: Perspectives of Iranian tourism suppliers. *Tourism Management Perspectives*, Vol. 19, pp. 90–92. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2016.05.001>
- Lenao, M. (2015). Challenges facing community-based cultural tourism development at Lekhubu Island, Botswana: a comparative analysis. *Current Issues in Tourism*, 18(6), 579–594. <https://doi.org/10.1080/13683500.2013.827158>
- Magigi, W., & Ramadhani, H. (2013). Enhancing Tourism Industry through Community Participation: A Strategy for Poverty Reduction in Zanzibar, Tanzania. *Journal of Environmental Protection*, 4, 1108–1122. <https://doi.org/10.4236/jep.2013.410127>
- Mak, B. K. L., Cheung, L. T. O., & Hui, D. L. H. (2017). Community Participation in the Decision-Making Process for Sustainable Tourism Development in Rural Areas of Hong Kong, China. *Sustainability*, 9(10), 1–13. <https://doi.org/10.3390/su9101695>
- Martini, N. K. A. (2020). Community Participation in Blangsinga Tourism Village Development. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 7(3), 91–97. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v7n3.922>
- Mortensen, M., & Haas, M. R. (2018). Rethinking Teams: from Bounded Membership to Dynamic Participation.

- Organization Science, 29(2), 1–15. <https://doi.org/10.1287/orsc.2017.1198>
- Mubita, A., Libati, M., & Mulonda, M. (2017). The Importance and Limitations of Participation in Development Projects and Programmes. *European Scientific Journal, ESJ*, 13(5), 238–251. <https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n5p238>
- Peiris, T. U. ., Sandaruwani, J. A. R. ., Aslam, M. S. ., & Wijekoon, W. M. S. . (2021). Countryside Capitalization and Community Empowerment through Tourism. *South Asian Journal of Tourism and Hospitality*, 2(1), 51–75. <https://doi.org/http://doi.org/10.4038/sajth.v2i1.45>
- Postelnicu, C., & Dabija, D.-C. (2016). Challenges and Development Prospects for Tourism in Romania. *Ecoforum*, 5(1), 84–89.
- Profil Desa Montongsari. (2020). Pembangunan Jangka Menengah Desa Montongsari Tahun 2020-2026.
- Putra, I. W. G. Y. D., & Indriyani, N. M. V. (2021). Handling the Economic Impact of the Covid-19 Pandemic on Tourism Village Area. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences (RJOAS)*, 9(117), 22–26. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-09.03>
- Rahina, B., & Wahyuhana, R. T. (2022). Analisis Potensi, Bentuk, dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pantai Amal Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. *Plano Buana*, 2(2), 87–98.
- Rahman, Y., Asbi, A. M., & Putri, H. T. (2020). Analisis Perubahan Perilaku Ekonomi Masyarakat sebagai Dampak Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Penggerak Wisata Desa Wisata Pesisir Pagar Jaya Kabupaten Pesawaran). *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 38–50. <https://doi.org/10.22146/jnp.52569>
- Setiyorini, H. P. D., Andari, R., & Masunah, J. (2019). Analysing Factors for Community Participation in Tourism Development. *THE Journal: Tourism and Hospitality Essentials Journal*, 9(1), 39–44. <https://doi.org/10.17509/thej.v9i1.16988>
- Singgalen, Y. A., Sasongko, G., & Wiloso, P. G. (2019). Community Participation in Regional Tourism Development: a Case Study in North Halmahera Regency - Indonesia. *Insights into Regional Development, Entrepreneurship, and Sustainability Center*, 1(4), 318–333. [https://doi.org/10.9770/ird.2019.1.4\(3\)](https://doi.org/10.9770/ird.2019.1.4(3))
- Sood, J., Lynch, P., & Anastasiadou, C. (2017). Community Non-Participation in Homestays in Kullu, Himachal Pradesh, India. *Tourism Management*, 60, 332–347. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.12.007>
- Sugarda, Y. B. (2020). Panduan Praktis Pelaksanaan Focus Group Discussion sebagai Metode Riset Kualitatif. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Retrieved from https://www.google.co.id/books/edition/Panduan_Praktis_Pelaksanaan_Focus_Group/gWIFEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Sunarti, S., Helmi, M., Widjajanti, R., & Purwanto, A. A. (2021). Modelling Behavioural Change from Sea-Based ‘Helicopter Latrines’ to Land-Based Shared Improved Latrines in the Demaan, Jepara, Indonesia. *Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development*, 11(1), 10–25. <https://doi.org/10.2166/washdev.2020.159>
- Widyastuty, A. A. S. A., & Dwiarta, I. M. B. (2021). Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata Kaba-Kaba Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Kawistara*, 11(1), 87–101. <https://doi.org/10.22146/kawistara.63535>
- Wondirad, A., & Ewnetu, B. (2019). Community Participation in Tourism Development as A Tool to Foster Sustainable Land and Resource Use Practices in A National Park Milieu. *Land Use Policy*, 88, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104155>
- Yanes, A., Zielinski, S., Cano, M. D., & Kim, S. Il. (2019). Community-Based Tourism in Developing Countries: A Framework for Policy Evaluation. *Sustainability*, 11(9), 1–23. <https://doi.org/10.3390/su11092506>
- Yatmaja, P. T. (2019). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 10(1), 27–36.
- Zhao, L., & Xia, X. (2020). Tourism and Poverty Reduction: Empirical Evidence from China. *Tourism Economics*, 26(2), 233–256. <https://doi.org/10.1177/1354816619863266>